

## Peran Tuas Kebijakan dalam Institutional Bricolage Pekerja Migran Indonesia Semi-Skilled Malaysia untuk Pemenuhan Gizi

### *The Role of Policy Levers in Institutional Bricolage among Indonesian Semi-Skilled Migrant Workers in Malaysia for Nutrition Fulfillment*

Nadia Yovani,<sup>1</sup> Viena Trixia Ompusunggu,<sup>2</sup> Krismanta Surbakti,<sup>3</sup>  
Aqilah Khayriyah,<sup>4</sup> Virna Gustya Putri,<sup>5</sup> & Reza Rizki Fadilla<sup>6</sup>

<sup>1</sup>[nadia@ui.ac.id](mailto:nadia@ui.ac.id) (corresponding author)  
Department Sociology, University of Indonesia  
Pondok Cina, Beji, Depok, West Java, Indonesia

<sup>2</sup>[viena.trixia@ui.ac.id](mailto:viena.trixia@ui.ac.id)  
Department Social Welfare, University of Indonesia  
Pondok Cina, Beji, Depok, West Java, Indonesia

<sup>3</sup>[krismanta.surbakti@ui.ac.id](mailto:krismanta.surbakti@ui.ac.id)  
Department Social Welfare, University of Indonesia  
Pondok Cina, Beji, Depok, West Java, Indonesia

<sup>4</sup>[aqilah.khayriyah@ui.ac.id](mailto:aqilah.khayriyah@ui.ac.id)  
Department Social Welfare, University of Indonesia  
Pondok Cina, Beji, Depok, West Java, Indonesia

<sup>5</sup>[virna.gustya@ui.ac.id](mailto:virna.gustya@ui.ac.id)  
Department Sociology, University of Indonesia  
Pondok Cina, Beji, Depok, West Java, Indonesia

<sup>6</sup>[rezarizki11@ui.ac.id](mailto:rezarizki11@ui.ac.id)  
Department Social Welfare, University of Indonesia  
Pondok Cina, Beji, Depok, West Java, Indonesia

Received: February 19, 2025 | Revised: April 23, 2025 | Published: June 30, 2025

**Abstract:** Cross-border labor migration has long been a global phenomenon. However, Indonesian migrant workers (PMI) in Malaysia still face challenges in fulfilling their nutritional needs. This study aims to analyze the adaptive practices of semi-skilled Indonesian migrant workers in Malaysia in meeting their nutritional needs using Jens Beckert's concepts of cognitive frame and institutional bricolage. This research adopts a qualitative approach, employing text network analysis (TNA), in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and photovoice in October 2024. The findings indicate that PMI's understanding of nutrition is shaped more by social networks among fellow migrant workers and colleagues/students than by formal institutions such as the Embassy of the Republic of Indonesia. This condition gives rise to a phenomenon of institutional bricolage, wherein workers independently find solutions to nutrition-related issues and share nutritional information within their communities. The study recommends the need for constructive dialogue between



the DPR RI and the Indonesian Student Association (PPI) regarding the fulfillment of food rights for PMI, the legalization of policies to reduce food prices, revisions to Indonesia–Malaysia bilateral regulations, and community-based nutrition training with PPI as a mediator. These findings and recommendations are expected to support policies that are responsive to the real needs of PMI through cross-commission advocacy in the DPR RI, particularly by Commission II, Commission IV, Commission VI, and Commission IX.

**Keywords:** *cognitive frame; institutional bricolage; Indonesia migrant workers; nutritional fulfillment; policy lever*

**Abstrak:** Migrasi tenaga kerja lintas negara telah lama menjadi fenomena global. Namun, pemenuhan gizi pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia masih menghadapi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik adaptasi PMI semi-terampil di Malaysia dalam memenuhi kebutuhan gizi dengan menggunakan konsep *cognitive frame* dan *institutional bricolage* dari Jens Beckett. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan *text network analysis* (TNA), wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD), dan *photovoice* pada Oktober 2024. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman PMI tentang gizi lebih banyak dibentuk oleh jaringan sosial sesama pekerja migran dan rekan kerja/kuliah daripada institusi formal seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kondisi ini memunculkan fenomena *institutional bricolage*, melalui solusi mandiri untuk masalah gizi dan berbagi informasi nutrisi melalui komunitasnya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dialog konstruktif antara DPR RI dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) mengenai pemenuhan hak pangan bagi PMI, legalisasi kebijakan pengurangan harga bahan makanan, revisi regulasi bilateral Indonesia dan Malaysia, serta pelatihan gizi berbasis komunitas dengan PPI sebagai mediator. Temuan dan rekomendasi ini diharapkan dapat mendukung kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan riil PMI melalui advokasi lintas komisi di DPR RI, yaitu Komisi II, Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi IX.

**Kata kunci:** *cognitive frame; institutional bricolage; pekerja migran Indonesia; pemenuhan gizi; tuas kebijakan*

## Pendahuluan

Migrasi merupakan fenomena yang telah mengakar dalam perjalanan sejarah manusia. Konsep nomaden menunjukkan bagaimana manusia berpindah tempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam era modern, migrasi tenaga kerja menjadi salah satu bentuk mobilitas manusia yang paling signifikan, terutama bagi negara berkembang, seperti Indonesia. Data menunjukkan bahwa hanya dalam periode Januari–Juli 2024, lebih dari 182.000 warga negara Indonesia di luar negeri menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) di berbagai negara, dengan Malaysia sebagai salah satu tujuan utama (Larasati, 2024).

Migrasi tenaga kerja Indonesia ke Malaysia ini memiliki sejarah panjang sejak 1980-an, khususnya di sektor semi-terampil, seperti manufaktur, konstruksi, dan perkebunan. Sektor ini menjadi pilihan utama karena tidak memerlukan kualifikasi pendidikan tinggi tetapi menawarkan pendapatan yang lebih baik dibandingkan di tanah air. Namun, dibalik cerita sukses yang sering ditampilkan, tersimpan realitas kelam tentang kondisi kerja dan kehidupan para PMI di negeri jiran. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia masih menghadapi realitas kerja yang sulit meskipun menjanjikan penghasilan yang lebih baik.

Masalah utama yang dihadapi PMI di Malaysia bersifat multidimensional. Menurut International Labour Organization (ILO, 2015), sebagian besar pekerja migran menghadapi kondisi kerja yang tidak manusiawi—mulai dari upah rendah, jam kerja panjang, hingga akses terbatas terhadap kebutuhan dasar seperti makanan bergizi. Ironisnya, banyak PMI bekerja di sektor yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam, seperti perkebunan kelapa sawit, tetapi tidak memiliki akses untuk memanfaatkan hasil bumi yang dikelola. Hal ini sejalan dengan temuan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Deputi 3 Kemenko PMK, 2023) yang menunjukkan bahwa di wilayah Sabah dan Serawak, para PMI di perkebunan kelapa sawit mengalami alienasi dari lahan yang diusahakannya.

Masalah gizi merupakan isu krusial yang sering terabaikan dalam diskursus perlindungan pekerja migran. Data menunjukkan sekitar 70 persen PMI di Malaysia kesulitan dalam mengakses makanan bergizi (Deputi 3 Kemenko PMK, 2023). Dampaknya, banyak PMI mengalami masalah gizi ganda karena kekurangan zat gizi mikro sekaligus kelebihan berat badan akibat konsumsi makanan cepat saji yang tinggi kalori tetapi rendah nutrisi. Kondisi ini diperburuk oleh sistem kerja yang ketat dan keterbatasan akses bahan pangan segar. Padahal, pekerja di sektor perkebunan seharusnya memiliki potensi untuk memanfaatkan sumber pangan lokal. Masalah gizi ganda ini tidak hanya dialami PMI yang bekerja di kawasan urban perkebunan atau industri Malaysia, tetapi juga terjadi di Indonesia. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan prevalensi obesitas penduduk usia  $\geq 18$  tahun meningkat dari 14,8 persen pada 2013 menjadi 21,8 persen pada 2018 (Riskesdas, 2019). Pola ini sejalan dengan laporan World Health Organization (WHO) pada tahun 2021 yang mencatat bahwa makanan olahan/minuman berpemanis menyumbang 65–80 persen asupan kalori harian masyarakat urban di Asia Tenggara meskipun minim zat gizi mikro (WHO, 2021). Temuan ini menunjukkan bahwa PMI di Malaysia juga berisiko meniru pola konsumsi masyarakat urban meskipun memiliki potensi untuk mengakses pangan lokal secara langsung melalui sektor kerjanya.

Dari sisi regulasi, Malaysia telah meratifikasi Konvensi *Equal Remuneration* No. 100 Tahun 1997 yang melarang diskriminasi upah terhadap pekerja migran. Pemerintah Malaysia juga mengumumkan kenaikan upah minimum menjadi RM 1700 mulai Februari 2025 (Bernama, 2024). Namun, perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja, termasuk akses pemenuhan gizi masih perlu diperkuat. Di sinilah, peran *policy lever* (tuas kebijakan) diperlukan untuk mendorong regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan pekerja migran.

Penelitian ini mengungkap lima kesenjangan kritis dalam perlindungan gizi bagi PMI, yaitu (1) diskusi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) tentang gizi belum berdampak nyata, (2) regulasi tidak menjamin akses gizi bagi PMI, (3) peran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) masih minim dalam menawarkan solusi praktis bagi PMI, (4) pelatihan kerja belum mengintegrasikan literasi gizi, dan (5) respons DPR RI terhadap isu ini belum optimal. Studi ini menawarkan model kolaborasi dan tuas kebijakan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Adapun pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini meliputi bagaimana deskripsi *cognitive frame* para PMI di Malaysia, bagaimana praktik *institutional bricolage* dari *cognitive frame* yang dibentuk oleh PMI Malaysia, dan bagaimana deskripsi tuas kebijakan yang diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi untuk DPR RI bagi PMI Malaysia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mempertimbangkan bahwa fenomena pemenuhan gizi bagi PMI merupakan isu yang relatif baru. Tujuan pengambilan data tidak berorientasi pada generalisasi tetapi memperdalam pema-

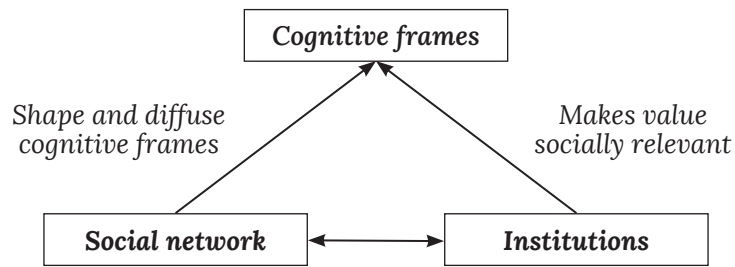
haman kontekstual. Konsep ini merujuk pada definisi yang dikemukakan Creswell dan Poth (2018) bahwa generalisasi dalam penelitian kualitatif berfokus pada kedalaman pemahaman terhadap konteks interpretasi sosial, bukan generalisasi statistik. Sementara itu, metode *photovoice* yang dikembangkan Wang dan Burris (1997), serta dikontektualisasi Jardon (2019) memungkinkan proses dokumentasi dan narasi pengalaman langsung dari PMI sebagai subjek penelitian. Foto-foto yang dihasilkan digunakan untuk menganalisis *cognitive frame* terkait isu pemenuhan gizi. Metode ini dipadukan dengan *focus group discussion* (FGD) dan wawancara mendalam yang dilakukan pada Oktober 2024 terhadap lima PMI semi-terampil di Malaysia. Kriteria partisan meliputi status legal di Malaysia, keterlibatan di sektor semi-terampil, dan pengalaman mengikuti pelatihan kerja.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan analisis jejaring sosial melalui *text network analysis* (TNA) untuk memetakan pola interaksi antara PMI dan berbagai institusi. Data digital diperoleh dari media sosial X (Twitter) dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (Bryman, 2014). Pendekatan multi-metode yang diterapkan dalam penelitian ini (Creswell & Clark, 2018) memungkinkan eksplorasi yang komprehensif terhadap praktik *institutional bricolage* di kalangan PMI. Penggabungan wawancara dengan PMI dan pengumpulan data digital melalui TNA memberikan gambaran makro mengenai isu “makanan bergizi” serta mengidentifikasi pola konsumsi makanan bergizi dalam kehidupan sehari-hari PMI di Malaysia.

### **Cognitive Frame Beckert**

Dalam karyanya tahun 2010, Beckert menekankan bahwa *cognitive frame*—struktur mental yang digunakan individu untuk memahami lingkungan ekonomi—sangat dipengaruhi oleh jaringan sosial dan konteks institusional. Kerangka ini membantu aktor menghadapi ketidakpastian dengan mengacu pada pemahaman bersama yang dibentuk melalui interaksi berkelanjutan dengan institusi dan sesama individu. Ketika mengkaji pengalaman hidup PMI melalui lensa teori Beckert, terlihat ketegangan penting yang menyoroti kesenjangan dalam penerapan kerangka tersebut. Meskipun PMI mengembangkan strategi yang canggih untuk menghadapi tantangan sehari-hari—seperti praktik bertani kolektif dan pertukaran berbagi informasi gizi—praktik-praktik ini terutama bersumber dari jaringan informal berbasis teman sebaya, bukan dari dukungan institusi formal. Hal ini menunjukkan ketidaksinambungan antara sistem pengetahuan informal dan peran institusi formal menjadi semakin nyata. Seharusnya, lembaga seperti KBRI dan PPI dapat berperan sebagai jangkar institusional dalam model Beckert, tetapi justru berada di posisi marginal dan sering kali tidak efektif dalam membentuk atau mendukung strategi adaptif tersebut (Deputi 3 Kemenko PMK, 2023). Akibatnya, *cognitive frame* PMI terbentuk dalam kekosongan institusional, sehingga adaptasi individu dan komunal berkembang secara organik tanpa penguatan struktural yang memadai. Kesenjangan ini menekankan urgensi peninjauan kembali pemahaman tentang kerangka institusional dalam konteks kerja lintas negara, terutama ketika mekanisme dukungan formal lemah atau tidak hadir. Untuk merepresentasikan dinamika konseptual tersebut, Gambar 1 memperlihatkan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.

Melalui konsep tersebut, Beckert menjelaskan proses terbentuknya *cognitive frame*—struktur mental yang digunakan individu untuk memahami lingkungan ekonomi. *Social network* dijelaskan sebagai relasi yang dimiliki dan dapat diakses oleh setiap aktor untuk membentuk *cognitive frame* dan mendukung pengambilan tindakan atau keputusan. Sementara itu, *institutions* merujuk pada entitas yang menciptakan norma



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Sumber: Battilana (2009), Beckert (2010, 2016), dan Feather (2002).

dan aturan sebagai acuan dalam menentukan tindakan atau keputusan. Interaksi antara kedua struktur tersebut menghasilkan kerangka perspektif yang disebut sebagai *cognitive frame*.

Dalam konteks ini, PMI menunjukkan kapasitas adaptif yang kreatif melalui jaringan berbagi makanan, tetapi praktik improvisasi sehari-harinya masih minim dikaji. Konsep *bricolage* dari Beckert—yang mencakup daya guna sumber daya, respons terhadap ketidakpastian, imajinasi sosial, dan agensi—belum diintegrasikan secara sistematis dalam tata kelola gizi migran. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya peluang yang terlewat untuk menghubungkan solusi akar rumput dengan kebijakan nasional yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas hidup PMI.

Terdapat kesenjangan penting antara neo-institusionalisme dan *bricolage*. Kebijakan *top-down* saat ini, seperti kebijakan upah minimum di Malaysia, cenderung mengikuti tekanan struktural (DiMaggio & Powell, 1983), tetapi mengabaikan inovasi akar rumput dari PMI. *Bricolage* dari Beckert (2016) menawarkan cara memahami strategi adaptif yang bersifat kontekstual dan berbasis agensi, tetapi belum ada studi yang meneliti bagaimana DPR RI dapat berperan dalam mentransformasikannya menjadi kebijakan lintas negara.

Kesenjangan ini mencerminkan peluang yang terlewat dalam merancang kebijakan berbasis agensi migran. Penelitian ini juga akan mengadopsi konsep *institutional bricolage*. Menurut Jens Beckert, *institutional bricolage* merupakan proses penciptaan, penyesuaian, dan rekonfigurasi institusi oleh aktor sosial—baik individu, organisasi, maupun negara—melalui penggabungan elemen-elemen yang tersedia. Elemen-elemen yang berasal dari berbagai sumber institusi ini digabungkan secara kreatif untuk menghasilkan solusi yang lebih relevan dan adaptif terhadap konteks tertentu (Beckert, 2010).

Dalam konteks pemenuhan gizi PMI, kerangka ini menjelaskan bagaimana individu yang telah dipengaruhi oleh *cognitive frame* dapat melakukan improvisasi dan kreasi untuk merespons tantangan kebijakan makan bergizi sebagai program prioritas nasional. Dengan menggunakan *institutional bricolage*, PMI berupaya menggabungkan berbagai elemen dalam jaringan sosial dan institusi yang dihadapi untuk menciptakan sistem yang memungkinkan akses gizi lebih baik dan efektif meskipun dalam kondisi terbatas. Jika bisa dibuat skema, konsep *institutional bricolage* mempunyai empat ciri khas, yaitu (1) penggunaan sumber daya yang ada, (2) respons terhadap ketidakpastian, (3) peran imajinasi sosial, serta (4) agen dan kreativitas. Keempat karakter ini dituangkan Beckert dalam bukunya *Imagined Future* (2016). Dengan demikian, Tabel 1 memperlihatkan perbedaan teori Jens Beckert dengan teori institusi lain.

Definisi *institutional bricolage* tidak merujuk pada penciptaan solusi yang optimal, tetapi pada proses kreatif dalam menggabungkan elemen-elemen institusi untuk membentuk arah atau strategi dalam menghadapi ketidakpastian, seperti yang terjadi

**Tabel 1. Perbedaan *Institutional Bricolage* dengan *Neo Institutional Theory***

| Aspek            | <i>Institutional Bricolage</i>               | <i>Neo-Institutional Theory</i>                |
|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Sumber perubahan | Improvisasi kreatif aktor                    | Tekanan lingkungan/isomorfisme                 |
| Fokus            | Proses <i>bottom-up</i> dan agensi           | Struktur dan tekanan eksternal                 |
| Peran masa depan | Pengendalian dilakukan imajinasi dan harapan | Pengendalian dilakukan dengan logika institusi |

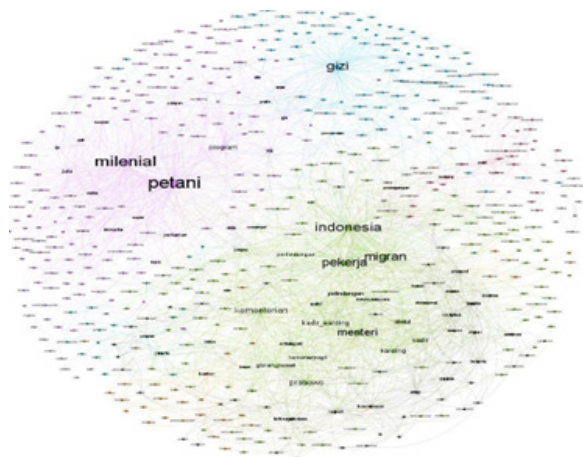
Sumber: Beckert (2016), Dimaggio & Powell (1983), North (1990), Scott (2014), dan Thorthon et al. (2012).

dalam proses migrasi. Beckert (2016) menjelaskan bahwa *institutional bricolage* adalah cara aktor sosial secara kreatif mengombinasikan elemen-elemen yang tersedia dari berbagai institusi untuk menghasilkan solusi adaptif dalam menghadapi situasi tidak pasti, meskipun ini tidak secara spesifik diterapkan pada konteks PMI. Penelitian ini memetakan *cognitive frame* PMI dalam konteks pemenuhan gizi. Melalui pemahaman terhadap *cognitive frame* yang dimiliki PMI, analisis dilakukan untuk melihat bagaimana *institutional bricolage* muncul sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi PMI, serta bagaimana PMI sebagai individu memanfaatkan elemen institusi untuk mengelola pemenuhan gizi dan pengelolaan tanah, meskipun berada dalam kondisi migrasi yang penuh ketidakpastian.

Adaptasi kreatif ini menunjukkan potensi besar. Namun, hasil riset mengungkapkan bahwa inovasi yang dikembangkan PMI sering terhambat oleh *institutional void*—ketiadaan dukungan kelembagaan yang memadai. Dalam konteks ini, tuas kebijakan berperan penting sebagai instrumen strategis yang dapat menghubungkan kreativitas akar rumput PMI dengan struktur kekuasaan negara. Sebagai contoh, kebijakan yang tepat dapat mentransformasi solusi lokal PMI menjadi regulasi yang lebih sistemis, sehingga memperkuat kerangka kelembagaan yang mendukung keberlanjutan usaha-usaha PMI (Sabatier & Weible, 2014).

### Deksripsi Pemenuhan Gizi: Temuan dari Cuitan di Media Sosial X

TNA dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Gephi berdasarkan data yang diperoleh dari media sosial X. Hasil pengolahan ribuan data menciptakan visualisasi yang memperlihatkan keterkaitan antarkata, yang direpresentasikan oleh garis penghubung setiap kata per kata yang memiliki keterkaitan. Keterkaitan kata ini menjadi temuan awal dari riset data digital tentang kognisi frame PMI terkait pemenuhan gizi.



**Gambar 2. Hasil Sebaran Data dari Media Sosial X**

Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

Data diperoleh dari media sosial X dengan kata kunci utama. Pertama, kata kunci 'Pekerja Migran Indonesia' digunakan untuk mengetahui berbagai topik yang berkaitan dengan PMI di platform tersebut. Kedua, 'Makanan Pekerja Migran Indonesia' untuk melihat pembahasan seputar makanan yang ditulis oleh PMI di media sosial X. Ketiga, 'Petani Milenial' untuk melihat keterkaitan PMI dengan usaha pengelolaan tanah di Indonesia. Seluruh data cuitan dari ketiga kata kunci tersebut digabungkan menjadi satu set data besar, kemudian diolah ke dalam unit kata yang dianalisis melalui aplikasi Gephi. Setiap kata membentuk jaringan berupa garis penghubung ke beberapa kata lainnya. Hal ini menjelaskan bahwa satu kata memiliki keterkaitan dengan kata lainnya di setiap kata kunci yang berbeda. Jarak antarkata yang makin dekat menunjukkan keterkaitan yang makin kuat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kata yang paling sering muncul adalah pekerja migran, gizi, dan petani milenial. Dalam kerangka TNA, tiga kata itu berfungsi sebagai *corpus* dalam penelitian yang data primernya dieksplorasi dalam FGD dan wawancara mendalam. Lebih lanjut, cuitan yang fokus pada tiga *corpus* itu adalah keterkaitan antara kata gizi dengan kata PMI. Berdasarkan data yang diperoleh, kata gizi hanya memiliki keterkaitan dengan kata Indonesia dan beberapa instansi pemerintah lainnya tetapi tidak kepada kata PMI. Selain itu, kata gizi memiliki keterkaitan yang kuat dengan konteks petani milenial, tetapi belum menjadi perbincangan yang sering dibicarakan di platform media sosial X.

### **Cognitive Frame Pekerja Migran tentang Gizi dan Kaitannya dengan Tuas Kebijakan**

Dalam bagian ini dijelaskan struktur institusional PPI.

"...Saat ini saya sebagai mahasiswa tahun ketiga di Universiti Malaya. Jadi aku ikut Universiti Malaya tapi memang ada PPIM yang mewakili Malaysia. Mungkin sekitar ada 11 PPI kampus" (Perwakilan PPI inisial A, 30 Oktober 2024).

"Biasanya kita ambil isu. Tiap PPI punya gagasan sendiri tentang isu itu. Apakah PPIM mem-posting isu tersebut. Ketika kita bersikap itu biasanya para ketua PPI berdiskusi untuk menunjukkan sikap. Organisasinya ada sekitar 30 orang untuk PPI" (Perwakilan PPI inisial A, 30 Oktober 2024).

PMI dan juga perwakilan PPI Universiti Malaysia mendefinisikan gizi sebagai gaya hidup dan pola makan yang sehat untuk dikonsumsi berdasarkan anjuran dari pemerintah yaitu 4 sehat 5 sempurna.

"'Kamu adalah apa yang kamu makan', sehingga jika makanan yang masuk bergizi pastinya badannya sehat, membantu otak berfungsi dengan baik" (PMI M, 31 Oktober 2024).

"Ini kan menunya 4 sehat 5 sempurna, ini kalau dari foto ini, ada kerupuk, pisang, telur, tempe. Tapi kayaknya gak dagingnya. Menurut aku kurang 4 sehat 5 sempurna, walau memang ada protein nabati. Tapi harusnya ada protein hewannya" (Perwakilan PPI inisial A, 30 Oktober 2024).

Perwakilan PPI Universiti Malaya juga memiliki pandangan bahwa definisi gizi itu sendiri berdasarkan dari kandungan makanan yang dikonsumsi secara seimbang. Pemenuhan gizi makanan harus terdiri dari karbohidrat, protein, serat, lemak baik, mineral, dan omega. Perwakilan PPI Universiti Malaya inisial A yang juga bagian dari PPI mengatakan protein tidak hanya protein nabati tapi juga perlu protein hewani.

Makanan bergizi menurut PMI seperti sayur-sayuran, daging, buah, telur dan air mineral. Sementara itu, makanan atau minuman yang kurang bergizi menurut PMI adalah seperti *junk food*, makanan instan, minuman manis, dan jenis makanan lainnya

yang dikonsumsi secara berlebihan. Semuanya berdampak pada kualitas pemenuhan gizi yang kurang maksimal sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang merugikan manusia.

“Sejak dini sih, sejak bayi itu lahir sudah harus diperhatikan. Kalau PMI dia harus memperhatikan itu sebelum ke Malaysia lah. Sejak kecil harusnya sudah dilatih pola hidup sehat, kaya makan sayur, daging.” (PMI D, 31 Oktober 2024).

Mereka mendapatkan pengetahuan ini dari teman-teman sesama PMI Malaysia. Teman-teman PMI ini adalah kelompok sosial bagi mereka.

“Punya teman-teman dari komunitas orang Indonesia yang bekerja di Malaysia yang sering olahraga bareng dan *sharing* tentang berita kondisi di Indonesia” (PMI Y, 30 Oktober 2024).

KBRI tidak mengatur regulasi terkait gizi. Isu-isu yang masih menjadi perhatian utama KBRI di Kuala Lumpur mencakup imigrasi, ketenagakerjaan, kewarganegaraan, kepelautan, perdagangan, dan layanan konsuler. Aspek pemenuhan gizi atau makanan bergizi tidak termasuk dalam regulasi ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan KBRI.



**Gambar 3. Tangkapan Layar Instagram KBRI di Kuala Lumpur**

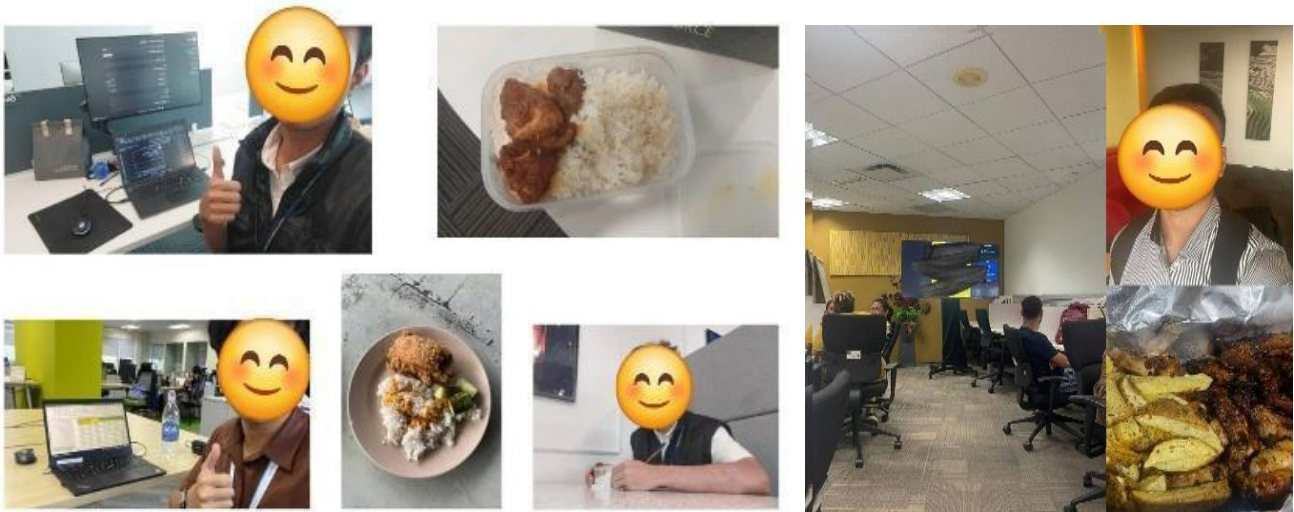
Sumber: Instagram @indonesiakualalumpur (2024).

Berdasarkan Gambar 3, terlihat bahwa layanan informasi terkait gizi belum tersedia pada akun Instagram KBRI di Kuala Lumpur, meskipun isu ini telah menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). Sebaliknya, layanan yang tersedia saat ini hanya berfokus pada layanan ketenagakerjaan, khususnya pengelolaan dokumen ketenagakerjaan, tanpa menyentuh aspek gizi.

Pemenuhan gizi yang seimbang bagi PMI sangat bergantung pada penghasilan yang diperoleh selama bekerja di luar negeri (IOM, 2019; Wahyuningsih, 2020). Penghasilan ini menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pilihan makanan sehari-hari PMI untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Peningkatan penghasilan setelah bekerja di luar negeri dapat meningkatkan taraf hidup, termasuk konsumsi makanan. Seiring peningkatan penghasilan, kesadaran PMI akan pentingnya gizi seimbang juga mulai tumbuh. Walaupun demikian, praktik pemenuhan kebutuhan gizi belum berjalan konsisten karena keterbatasan waktu dan pola kerja yang padat. Selain itu, PMI sering memilih makanan berdasarkan rasa enak meskipun tidak selalu bergizi. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan PMI tidak diikuti oleh pengetahuan yang memadai mengenai pentingnya konsumsi makanan bergizi.

“Artinya pendapatan orang yang besar tidak berbanding lurus juga dengan pengetahuan mengenai makanan bergizi” (RA, 2024).

Hal ini terlihat dari ketika PMI menunjukkan foto makanan yang dibawa saat bekerja dan dikonsumsi setiap hari, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.



**Gambar 4. Keseharian dan Makanan yang Dibawa PMI Malaysia Saat Bekerja**

Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

Makanan bergizi dalam konteks ini adalah makanan yang memenuhi kebutuhan gizi orang dewasa, dengan fokus khusus pada PMI. Hal ini penting karena PMI bekerja di luar negeri untuk mencari nafkah dan mengirimkan remitansi ke Indonesia. Penelitian ini menggunakan foto yang menggambarkan bagaimana PMI memahami konsep makan bergizi. Hasilnya menunjukkan bahwa PMI mengikuti isu mengenai makan bergizi yang berkembang di Indonesia. Ini relevan dengan kebijakan makan bergizi gratis di Indonesia dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan untuk PMI sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Selain itu, para pekerja migran memiliki keluarga di Indonesia, termasuk anak-anak yang juga membutuhkan asupan gizi yang baik. Meskipun penghasilan PMI tidak selalu berbanding lurus dengan pemenuhan gizi, sebagaimana disampaikan informan dan ditunjukkan dalam studi Wahyuningsih (2020) dan IOM (2019), keduanya memang memiliki hubungan yang saling terkait.



**Gambar 5. Foto Photovoice**

Sumber: Santoso (2023) dan “Gibran klaim program” (2024).

Saat foto ditampilkan, *cognitive frame* para pekerja migran lebih merujuk pada makanan yang biasanya diterima oleh anak-anak sekolah dasar di Jakarta, sebagaimana terlihat dalam Gambar 5. Ada ketidaksinkronan antara perspektif PMI dalam menilai dari foto yang diberikan dan bagaimana *cognitive frame* PMI terbentuk untuk gizi diri sendiri (orang dewasa) bukan untuk anak-anak.

Riset ini juga menemukan ada ketidaksesuaian antara pendapatan PMI yang relatif tinggi dengan pandangan masyarakat Indonesia mengenai kualitas gizi yang dikonsumsi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman PMI tentang gizi

dan kondisi konsumsi aktual yang seharusnya diperoleh sesuai dengan tingkat pendapatan. Informan AZ dalam wawancara juga menjelaskan hal tersebut.

“Menyinggung teknologi, aku sempat menganalisis percakapannya sih, mbak. Kalau tadi dibilang walaupun tinggi pendapatannya belum tentu *aware*. Tantangan begini ternyata sebaliknya juga buat mereka. Seperti mereka lah mahasiswa. Benarkah mahasiswa itu bukan tentang gaji, tetapi dengan kebutuhan ke kehidupan mereka ke *onedrive* mereka juga. Gak cukup yakin mereka memilih hemat, iya. Ada beberapa yang bilang, mereka masak-masak sendiri gitu, tapi yang mereka masak sendiri itu juga yang instan” (PMI inisial AZ, 30 Oktober 2024).

Dalam konteks potensi akses makanan bergizi di Malaysia, PMI di Malaysia berpandangan bahwa secara ekonomi tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh makanan bergizi yang terjangkau untuk memenuhi nutrisi sehari-hari. Hal ini karena pendapatan yang lebih tinggi selama bekerja di Malaysia relatif lebih memudahkan akses terhadap makanan bergizi dengan harga tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya pendapatan PMI di Malaysia sejalan dengan kemudahan akses makanan bergizi karena harga pangan relatif mirip dengan di Indonesia.

“Dalam mengakses makanan di Malaysia, seharusnya secara ekonomi nggak ada halangan ya. Apalagi ngikutin UMR di sini pasti bisa memenuhi kebutuhan (dasar/pangan)” (PMI inisial B, 31 Oktober 2024).

PMI mengidentifikasi setidaknya tiga aspek penting dari *cognitive frame* yang dapat berkontribusi terhadap pemenuhan gizi, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat Indonesia setelah kembali ke tanah air. Kontribusi pertama adalah melalui pendidikan atau edukasi, yaitu PMI dapat berbagi pengetahuan dan wawasan yang diperoleh tentang pola makan bergizi dan kesehatan yang dipelajari selama bekerja di luar negeri. Kedua, transfer keterampilan yang melibatkan kemampuan praktis dan pengetahuan yang dapat diterapkan untuk pengelolaan gizi atau mengedukasi masyarakat sekitar mereka. Ketiga, PMI memberikan remitansi yang dapat digunakan oleh keluarga PMI di Indonesia untuk membeli makanan bergizi, meskipun hal ini tidak selalu diiringi dengan pengetahuan tentang pentingnya konsumsi gizi yang tepat. Melalui ketiga aspek tersebut, PMI dapat memberikan dampak positif terhadap pemenuhan gizi pada tingkat keluarga dan masyarakat luas.

Menurut informan penelitian, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan berkolaborasi positif dengan optimalisasi sumber daya alam. Aspek edukasi dinilai lebih prioritas, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan gizi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh satu satu peserta FGD.

“Korelasinya lebih edukasinya aja sih, ga terpatok di SDA aja. Ngomong kaya niatan, ada banget, tapi kalau aksi kayanya engga dan belum kepikiran sih” (PMI MH, FGD 29 Oktober 2024).

Hal ini juga disampaikan salah satu informan dalam wawancara mendalam.

“Kalau pendidikan bisa dari menteri pendidikan membuat program *training* dll. itu sangat penting terutama *training* teknologi di zaman sekarang” (PMI R, 30 Oktober 2024).

Selain edukasi, transfer keterampilan merupakan bentuk kontribusi yang dapat diberikan PMI dengan memberikan pelatihan keterampilan yang berguna untuk pemenuhan gizi diri sendiri sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Hal ini disampaikan oleh salah satu PMI.

“Walaupun orangnya masih di luar negeri, kaya aku contohnya, kalau mau mentransfer skill ke orang-orang Indonesia kan bisa melalui *online* ga harus *physical* kan. Jadi ya untuk mentransfer skill untuk pengelolaan sumber daya di Indonesia bisa-bisa aja dilakukan” (PMI D, 31 Oktober 2024).

### ***Institutional Bricolage* Makan Bergizi bagi PMI Semi-Terampil di Kuala Lumpur**

Pemenuhan gizi memerlukan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Namun, menurut informan, pemerintah belum sepenuhnya peduli dengan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dan literasi teknologi juga perlu diperkuat, agar masyarakat memiliki keterampilan yang mendukung pemenuhan gizi yang lebih baik. Dengan kolaborasi yang lebih baik dan dukungan pemerintah, masyarakat dapat lebih mandiri dan berdaya dalam mengelola gizi secara berkelanjutan. Sementara itu, Pemerintah Malaysia sebagai institusi sudah menyediakan tempat untuk membeli makanan bergizi. Hal ini juga disampaikan oleh informan M sebagai berikut.

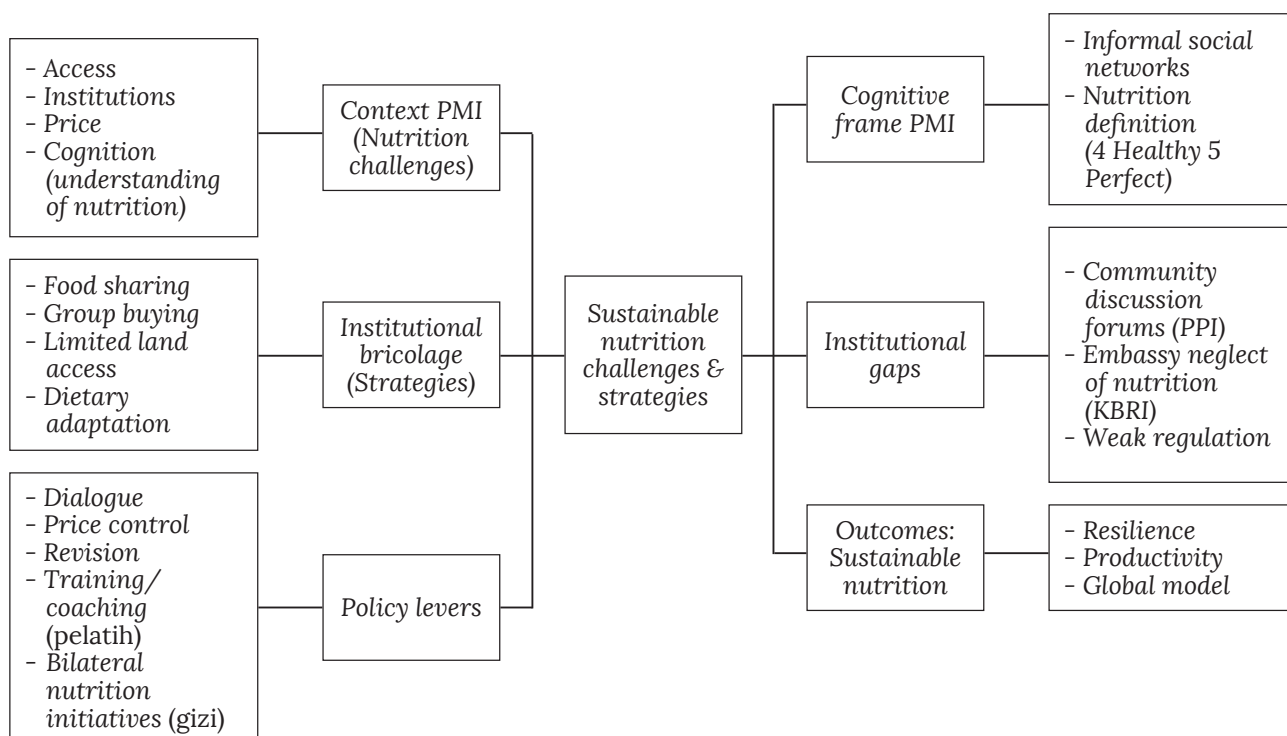
“Di Malaysia pemerintahnya mendukung masyarakat untuk hidup lebih baik mulai dari penyediaan pendidikan yang mudah diakses (rata-rata sekolah di Malaysia gratis) sehingga orang tua tidak diberatkan/dipusingkan dengan biaya pendidikan. Kedua, pendapatan yang lebih tinggi sehingga kemampuan masyarakat untuk mengakses makanan bergizi lebih tinggi (karena daya beli yang lebih tinggi meskipun harga pangan di Indonesia dan Malaysia tidak berbeda jauh). Kesimpulannya, secara regulasi dan cara berpikir pemerintah dan masyarakat Malaysia sudah lebih luas terutama karena eksposur Malaysia terhadap dunia internasional lebih besar (p: karena memikirkan pemenuhan gizi dengan melayakkan kualitas hidup masyarakatnya dari pendidikan, dari penghasilan)” (PMI inisial M, 2024).

Di sisi lain, menurut *cognitive frame* informan M, dukungan pemerintah Indonesia dalam hal pemenuhan gizi masih terbatas pada tahapan berikut.

“Di Indonesia, masyarakatnya masih terpaku untuk bagaimana cara mendapat uang dengan cepat, sehingga pemenuhan/perbaikan gizi masih perlu diintervensi oleh pemerintah agar selanjutnya masyarakat Indonesia memiliki pemikiran yang lebih baik, dapat lebih mampu mengakses informasi, dan akhirnya dapat membenahi diri sendiri. (Kesimpulannya: dengan upaya pemenuhan gizi dari program makan gratis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, maka dapat membantu perkembangan cara berpikir masyarakat/tingkat penyerapan informasi yang lebih baik sehingga kemudian akan berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup masyarakat)” (PMI M, 2024).

Perbedaan pandangan pemerintah sebagai institusi mengenai pemenuhan gizi membuat PMI di Malaysia berada dalam situasi *institutional bricolage*. Dalam kondisi ini, PMI cenderung memanfaatkan elemen-elemen yang tersedia untuk menciptakan solusi kreatif demi menjaga pemenuhan gizinya. Oleh karena itu, dibutuhkan tuas kebijakan yang dapat menghasilkan regulasi yang efektif untuk mendukung keberlanjutan pemenuhan gizi PMI di masa depan.

Hasil olahan data digital media sosial X menggambarkan bahwa diskusi pengguna mengenai gizi, pekerja migran, dan pemenuhan gizi terdistribusi pada area yang berbeda seperti yang terlihat pada Gambar 7.



Istilah “gizi” lebih terpusat pada area yang berbeda dari kelompok istilah yang berkaitan dengan “pekerja migran Indonesia”. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan tentang gizi tidak berhubungan dengan pembahasan tentang PMI yang dibicarakan di media sosial X. Dapat disimpulkan bahwa belum ditemukan pembahasan gizi dalam jaringan sosial PMI di media sosial X.

**Gambar 7. Keterkaitan Kelompok Istilah “Gizi” dan “Pekerja Migran Indonesia”**  
Sumber: Media Sosial X, diolah (2024).

huan dan pandangan tersebut datang dari pengalaman semasa kecil di keluarga dan sekolah, serta saat mereka telah menetap di Malaysia dan terpapar dengan informasi yang tersebar melalui teman-teman dan media sosial. Hal ini selaras dengan teori Jens Beckert yang menyebutkan bahwa *cognitive frame* seseorang berinteraksi dan dipengaruhi oleh institusi dan jaringan sosial.

Lebih luas lagi, *cognitive frame* PMI terhadap gizi juga terlihat dari pandangan mengenai kondisi gizi di Indonesia. Ditemukan bahwa PMI mengetahui upaya pemenuhan gizi yang dilakukan pemerintah di Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis. Program Makan Bergizi Gratis merupakan solusi konkret yang diterapkan untuk memastikan setiap anak-anak sekolah dapat memperoleh akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi. Dengan kualitas pangan yang baik serta gizi yang terpenuhi sejak dini, anak-anak Indonesia diharapkan tumbuh menjadi generasi yang unggul.

Selaras dengan pernyataan tersebut, PMI berpandangan bahwa program ini merupakan suatu upaya yang baik dari pemerintah untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui asupan gizi. Pemenuhan gizi yang seimbang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan anak sehingga tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Meskipun demikian, banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam program ini, seperti kesesuaian sasaran program, variasi makanan, dan yang paling penting adalah kualitas makanan yang diberikan agar tujuan dari program bisa tercapai dan pelaksanaan program tidak disalahgunakan untuk kepentingan suatu pihak. PMI beranggapan bahwa sasaran yang tepat bagi program ini adalah anak umur sekolah dasar yang sedang dalam masa pertumbuhan dan kesulitan dalam mengakses makanan bergizi.

Program Makan Bergizi Gratis juga memiliki intensi untuk berfokus dalam memberdayakan ekonomi di daerah dan menumbuhkan ekonomi inklusif. Implementasi program ini mendorong keterlibatan petani, peternak, dan nelayan lokal sebagai pemasok utama bahan makanan bergizi sehingga hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan keberlanjutan rantai pasok pangan nasional. Program ini merupakan bentuk dari *cognitive frame* pemerintah Indonesia yang berbeda dengan *institutional bricolage* para PMI sebagai individu tentang makan bergizi itu sendiri. Dalam *institutional bricolage* setidaknya ada empat ciri khas yang peneliti bisa lihat dalam konteks PMI di Malaysia. Para PMI seperti disebutkan di atas menggunakan sumber daya yang ada di Malaysia seperti yang PMI inisial M sampaikan di atas. Penggunaan sumber daya ini menyebabkan adanya respons ketidakpastian oleh PMI. Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana PMI inisial M mendefinisikan gizi. Dia cenderung memasukkan gaya hidup dalam gizi itu. Setiap PMI mendefinisikan gizi sesuai dengan yang mereka ketahui, di mana informasi ini -menurut PMI inisial Y- diperoleh dari teman-teman sesama PMI atau teman komunitas yang ada di Malaysia. Hal ini tentunya membuat PMI berimajinasi sosial tentang gizi itu sendiri. Dengan demikian PMI sebagai agen memiliki kreativitas untuk gizi itu sendiri.

Hal ini juga terlihat secara institusional dengan tidak adanya layanan gizi dari KBRI di Kuala Lumpur seperti dapat dilihat di Gambar 3. Konsep makan bergizi ini tentu berbeda dengan konsep yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Konsep pemerintah Indonesia untuk Makan Bergizi Gratis dapat dilihat di Tabel 2.

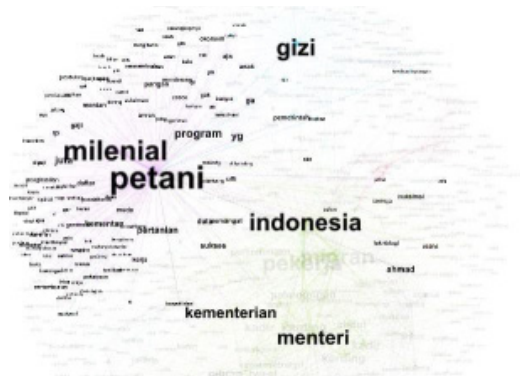
Keempat aspek tersebut memperlihatkan bagaimana praktik *institutional bricolage* berjalan sesuai dengan dimensi dari Jens Beckert yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, isu gizi dan pemenuhan gizi perlu dilihat secara komprehensif.

**Tabel 2. Perbandingan Konsep MBG dan 4 Sehat 5 Sempurna**

| Aspek       | Makan Bergizi Gratis                | 4 Sehat 5 Sempurna                    |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Konsep      | Proporsi dan variasi nutrisi        | Daftar kelompok makanan               |
| Susu        | Bukan wajib tergantung kebutuhan    | Dianggap sempurna untuk mengukur gizi |
| Penyesuaian | Mempertimbangkan usia dan aktivitas | Tidak ada panduan proporsi            |

Sumber: Kemenkes (2017); Permenkes No. 41 Tahun 2014.

Keterkaitan ini juga ditunjukkan dengan hasil TNA pada Gambar 8. Gambar 8 menunjukkan data digital di media sosial X yang menggambarkan adanya keterkaitan antara kelompok kata kunci dari aspek pemenuhan gizi, tanah, dan gizi. Pembahasan mengenai keterkaitan ketiganya ini menandakan adanya pandangan dalam jaringan sosial bahwa sektor pertanian, terutama dengan partisipasi petani milenial, berperan penting dalam menciptakan ketahanan pangan dan meningkatkan status gizi masyarakat.



**Gambar 8. Keterkaitan Kelompok Istilah Gizi, Tanah, dan Pemenuhan Gizi**

Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

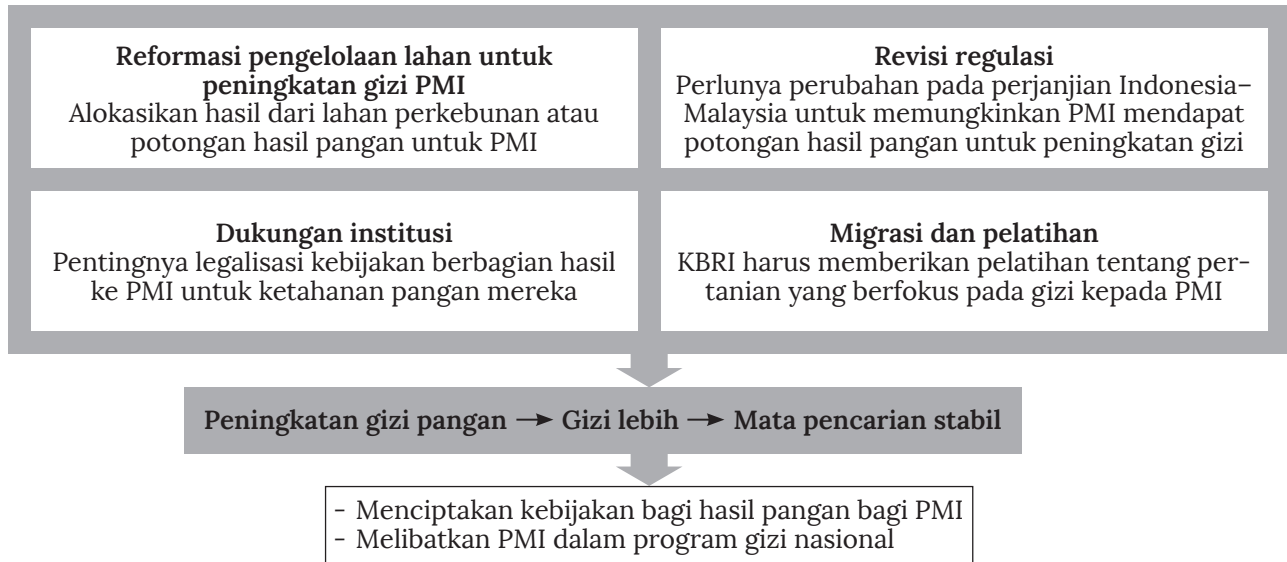
Analisis kata gizi menunjukkan bahwa kata yang sering muncul adalah kementerian, menteri, petani milenial, dan Indonesia. Temuan di media sosial X ini menunjukkan bahwa *cognitive frame* para PMI masih berpusat pada kebijakan pemerintah yang dilaksanakan di Indonesia. Untuk konteks luar negeri, pola konsumsi PMI masih sama dengan sebelum ada kebijakan Makan Bergizi Gratis. Dengan demikian, peran DPR RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi diperlukan untuk memperbaiki undang-undang yang ada. Hal ini disebabkan karena PMI adalah warga Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia yang tinggal di dalam negeri.

Kemunculan *institutional bricolage* di kalangan PMI di Malaysia, khususnya semi-terampil di Kuala Lumpur, memperlihatkan adanya kebutuhan mendalam akan tuas kebijakan yang dapat mendukung pemenuhan gizi yang lebih baik dan efektif. Proses improvisasi dan kreativitas yang dilakukan PMI dalam menghadapi keterbatasan akses sumber daya menunjukkan pentingnya kebijakan yang dapat mengoptimalkan potensi yang ada, terutama dalam peningkatan kualitas gizi. Oleh karena itu, pengembangan tuas kebijakan yang tepat sangat diperlukan untuk menciptakan regulasi yang mampu mengatasi tantangan tersebut, sekaligus memberdayakan PMI dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

### **Tuas Kebijakan untuk Regulasi Makan Bergizi bagi Warga Indonesia**

Tuas kebijakan merujuk pada instrumen atau mekanisme yang digunakan oleh pemerintah atau pembuat kebijakan untuk memengaruhi perilaku masyarakat, mengarahkan pembangunan, atau mencapai tujuan tertentu dalam suatu bidang. Tuas kebi-

jakan dapat berupa regulasi, insentif, program, pendanaan, atau intervensi struktural yang dirancang untuk menghasilkan perubahan sistemis (Ansell, 2008; Howlett, 2009; UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia). Tuas kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah regulasi, sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 9.



**Gambar 9. Kerangka Berpikir Tuas Kebijakan terhadap PMI dalam Pemenuhan Gizi**

Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

Karakteristik utama dari sebuah tuas kebijakan mencakup tiga aspek penting. Pertama, tuas kebijakan harus dapat dikendalikan (*controllable*), yaitu pemerintah memiliki otoritas dan kapasitas untuk mengatur atau mengubahnya sesuai kebutuhan (Hood & Margetts, 2007). Kedua, kebijakan tersebut harus memiliki dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dapat berupa kebijakan, seperti subsidi yang segera dirasakan, sedangkan dampak tidak langsung bisa berupa reformasi struktural jangka panjang, seperti reformasi pendidikan (Bemelmans-Videc et al., 2011). Ketiga, tuas kebijakan idealnya berbasis pada bukti (*evidence-based*), yaitu dirancang berdasarkan data, evaluasi empiris, dan praktik terbaik yang telah terbukti (Cairney, 2016; Head, 2016).

Dalam konteks pemenuhan gizi bagi PMI, usulan tuas kebijakan ini dapat direalisasikan melalui revisi perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia, khususnya yang mengatur standar dan dukungan pemenuhan gizi bagi pekerja migran. Dengan demikian, pengaturan tersebut akan selaras dengan konsep pemenuhan gizi yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Langkah ini penting mengingat tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempersulit pemerataan gizi nasional. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang sistematis dan berbasis bukti menjadi sangat krusial.

Untuk mendukung pemenuhan gizi yang optimal dan pengelolaan tanah yang berkelanjutan bagi PMI, dibutuhkan serangkaian tuas kebijakan yang terarah dan implementatif. Pertama, reformasi pengelolaan lahan perlu didorong melalui dialog partisipatif dan konstruktif dengan PPI di Malaysia, agar lahir regulasi yang berpihak pada kebutuhan nyata PMI. Kedua, kebijakan potongan harga untuk bahan pangan di Malaysia bagi PMI dapat diformulasikan guna mendorong konsumsi gizi yang seim-

bang dalam rumah tangga PMI selama masa kerja di luar negeri. Kebijakan ini dapat diintegrasikan dalam revisi perjanjian bilateral Indonesia–Malaysia.

Ketiga, dukungan kelembagaan diperlukan untuk memperkuat akses PMI terhadap pangan bergizi, termasuk melalui penyesuaian perjanjian bilateral agar subsidi atau keringanan harga bahan pangan dapat dilaksanakan secara legal dan berkelanjutan. Keempat, kebijakan pemberdayaan PMI pasca-migrasi menjadi krusial, terutama dalam aspek akses sumber daya pertanian, teknologi, dan pelatihan berbasis gizi. KBRI berperan penting dalam memfasilitasi pelatihan pertanian berorientasi gizi sebagai bekal untuk kemandirian pangan saat PMI kembali ke tanah air. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan ketahanan gizi PMI, tetapi juga membuka peluang kontribusi nyata terhadap pembangunan sektor pertanian nasional.

Untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan tindakan kolektif yang mendukung partisipasi aktif PMI dalam upaya pemenuhan gizi. Oleh karena itu, seruan bertindak diperlukan untuk membentuk kebijakan yang mendukung terbentuknya Zona Pangan PMI—sebuah konsep yang memungkinkan PMI mengakses dan mengelola lahan secara mandiri, baik di negara tujuan migrasi maupun di Indonesia. Partisipasi PMI dalam program makan bergizi dan pengelolaan pangan tidak hanya akan memperkuat ketahanan pangan individu, tetapi juga menopang ketahanan pangan nasional. Ini menjadi langkah penting menuju sistem yang inklusif dan berkelanjutan, yang menempatkan PMI sebagai pengirim remitansi sekaligus agen perubahan dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia.

## Penutup

Penelitian ini mengungkap strategi adaptif berbasis komunitas–*institutional bricolage*—yang dikembangkan oleh PMI semi-terampil di Malaysia sebagai respons atas minimnya dukungan kelembagaan formal. Praktik seperti berbagi informasi nutrisi, pembelian pangan kolektif, serta saling bantu dalam memilih makanan bergizi muncul sebagai bentuk improvisasi sosial yang berakar pada *cognitive frame* yang dibangun melalui jejaring sesama migran. Namun, solusi organik ini masih rapuh karena terhambat oleh tiga kesenjangan sistemis, yaitu diskusi PPI belum terhubung dengan kebijakan formal, tidak ada jaminan akses gizi dalam kerangka regulasi bilateral Indonesia–Malaysia, dan literasi gizi belum terintegrasi dalam program pelatihan kerja formal. Untuk mentransformasi inisiatif lokal yang bersifat sporadis ini menjadi perlindungan struktural berkelanjutan, diperlukan intervensi negara melalui desain tuas kebijakan yang tepat sasaran.

Dalam konteks ini, dialog yang terstruktur dan berkelanjutan antara PPI dan DPR RI lintas komisi menjadi sangat penting untuk merumuskan kebijakan pemenuhan gizi berbasis data dan kebutuhan riil PMI. Beberapa solusi konkret dapat diimplementasikan, antara lain, penyediaan kartu potongan harga pangan bagi PMI di Malaysia sebagai bentuk kontrol harga berbasis subsidi; revisi dan renegotiasi perjanjian bilateral Indonesia–Malaysia dengan klausul akses pangan bergizi; serta penjaminan bahwa hasil diskusi lintas aktor dituangkan ke dalam instrumen hukum bilateral. Selain itu, program pelatihan *peer-to-peer* mengenai budidaya mikro berbasis gizi dan deteksi dini malnutrisi perlu dikembangkan bagi PMI yang akan kembali ke tanah air. Kolaborasi lintas komisi DPR RI, seperti Komisi II (untuk revisi regulasi), Komisi IV (pendampingan sektor pangan), Komisi VI (negosiasi harga dan logistik), serta Komisi IX (penguatan layanan kesehatan KBRI), menjadi kunci dalam mengorkestrasi kebijakan yang menyeluruh dan berkeadilan demi pemenuhan hak dasar pangan bagi seluruh PMI.

## Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2019). *Laporan nasional RISKESDAS 2018* [Laporan Riset Kesehatan Dasar 2018]. Kementerian Kesehatan. <http://labdata.litbang.kemkes.go.id/riset-badan-litbangkes/menu-riskenas/menu-riskesdas/374-rkd-2018>
- Battilana, J., & D'Aunno, T. (2009). Institutional work and the paradox of embedded agency. In T. B. Lawrence, R. Suddaby, & B. Leca (Eds.), *Institutional work: Actors and agency in institutional studies of organizations* (pp. 31–58). Cambridge University Press.
- Beckert, J. (2010). How do fields change? The interrelations of institutions, networks, and cognition in the dynamics of markets. *Organization Studies*, 31(5), 605–627. <https://doi.org/10.1177/0170840610372184>
- Beckert, J. (2010). Institutional isomorphism revisited: Convergence and divergence in institutional change. *Sociological Theory*, 28(2), 150–166. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9558.2010.01369.x>
- Beckert, J. (2016). *Imagined futures: Fictional expectations and capitalist dynamics*. Harvard University Press.
- Bemelmans-Videc, M.-L., Rist, R. C., & Vedung, E. (Eds.). (2011). *Carrots, sticks & sermons: Policy instruments and their evaluation*. Transaction Publishers.
- Bryman, A. (2012). *Social research methods* (4<sup>th</sup> ed.). Oxford University Press.
- Cairney, P. (2016). *The politics of evidence-based policy making*. Palgrave Pivot. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-51781-4>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3<sup>rd</sup> ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Generalization and transfeability In *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4<sup>th</sup> ed., pp. 178–186). SAGE Publications.
- Deputi 3. (2023, Desember 2). *Mewujudkan Indonesia bebas malnutrisi*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan [Kemenko PMK]. <https://www.kemenkopmk.go.id/wujudkan-indonesia-bebas-malnutrisi>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Gibran klaim program makan bergizi gratis paling didukung ibu-ibu. (2024, Desember 13). *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241213114311-20-1176984/gibran-klaim-program-makan-bergizi-gratis-paling-didukung-ibu-ibu>
- Head, B. W. (2016). Toward more "evidence-informed" policy making? *Public Administration Review*, 76(3), 472–484. <https://doi.org/10.1111/puar.12475>
- Hood, C. C., & Margetts, H. Z. (2007). *The tools of government in the digital age* (2<sup>nd</sup> ed.). Palgrave Macmillan.
- Howlett, M. (2009). Governance modes, policy regimes and operational plans: A multi-level nested model of policy instrument choice and policy design. *Policy Sciences*, 42(1), 73–89. <https://doi.org/10.1007/s11077-009-9079-1>
- International Labour Organization [ILO]. (2015). *World employment social outlook: Trends 2015*. [https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms\\_436343.pdf](https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_436343.pdf)

- International Organization for Migration [IOM]. (2019). *Labour migration in Indonesia: Trends and policies*. (Report No. IN/2020/01). <https://www.iom.int/sites/default/files/reports/IOM-Indonesia-2019-Migration-Report.pdf>
- Jardon, M. (2019). *Photovoice handbook for social workers: Method, practicalities, and possibilities for social change*. Palgrave Pivot
- Larasati, S. D. (2024, Oktober 21). Apa itu pekerja migran? *Antara*. <https://www.antaranews.com/berita/4412837/apa-itu-pekerja-migran-Indonesia>
- Minimum wage of RM1,700 also applies to foreign workers. (2024, Oktober 19). *Bernama.com*. <https://www.bernama.com/en/news.php?id=2353898>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. (2024).
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (Eds.). (2014). *Theories of the policy process* (3<sup>rd</sup> ed.). Westview Press.
- Santoso, A. (Ed.). (2023, November 23). Bapanas, ministry strengthens food security through a school campaign. *Antara*. <https://en.antaranews.com/news/298314/bapanas-ministry-strengthens-food-security-through-school-campaign>
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities* (4<sup>th</sup> ed.). SAGE Publications.
- Wahyuningsih, S. (2020). *Kebijakan perlindungan pekerja migran: Tantangan dan solusi*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wang, C., & Burris, M. A. (1997). Photovoice: Concept, methodology, and use for participatory needs assessment. *Health Education & Behavior*, 24(3), 369–387. <https://doi.org/10.1177/109019819702400309>